

HAK-HAK PROPERTI DALAM PENGELOLAAN HUTAN NEGARA DI JAWA

Oleh :

JEN TATUH*)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perhutanan Sosial (selanjutnya disingkat sebagai PS) merupakan produk dari perubahan kelembagaan alam pengelolaan hutan. Pada masa pengelolaan hutan dengan prinsip-prinsip yang dipengaruhi oleh aliran pemikiran dari Jerman¹⁾, penduduk sekitar hutan (selanjutnya disingkat sebagai PSH) terisolasi, secara kelembagaan, dari sumber daya hutan sehingga menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial (Kartasubrata, 1988). Prinsip ini nampaknya sulit dipertahankan karena ketegangan sosial makin meningkat. Dalam pengelolaan hutan yang baru ada kesadaran yang kuat mengenai pentingnya peran serta PSH didalamnya²⁾. Isolasi secara kelembagaan antara PSH dengan sumber daya hutan mengendur. PSH diperbolehkan memasuki kawasan hutan dengan kegiatan usahatani tumpangsari dan pemeliharaan tanaman kehutanan.

Pada masa-masa selanjutnya, keterlibatan PSH yang terbatas itu mengalami perkembangan. Perkembangan ini, yang diduga diindus oleh kesenjangan relatif yang masih melebar antara pendapatan tenaga kerja dan penerimaan atas sumber daya lahan di pedesaan, telah menimbulkan "interaksi" yang kurang menguntungkan dua pihak, yakni pengelola hutan dan PSH.

*) Mahasiswa S₃ Fakultas Pasca Sarjana IPB, dibawah bimbingan Dr Ir B Saragih, MEc., Dr Ir P Simatupang, Dr Ir A Pakpahan, Prof Dr Ir R S Sinaga, Dr Ir Junus Kartasubrata dan Dr Ir B D Nasendi.

- 1) Menurut pemikiran ini, petugas kehutanan memandang dirinya sebagai penyelamat hutan terhadap segala gangguan, termasuk gangguan dari penduduk sekitar hutan (Kartasubrata, 1989).
- 2) Pendekatan baru dalam pengelolaan hutan telah menjadi isu internasional sejak tahun 1970-an (Kartasubrata, 1989), dan telah menjiwai beberapa Kongres Kehutanan Sedunia, antara lain kongres ke 8 tahun 1978 di Jakarta, dengan salah satu deklarasinya yang berbunyi : "... Therefore the Congress declared the world's forest must, on a sustainable basis, be used for all people ..." (Anon, 1978).

Untuk menanggulangi kecenderungan interaksi yang kurang menguntungkan tersebut maka dikembangkan pola baru pengelolaan hutan yang dijabarkan dalam program PS. PS dibangun atas dasar kesepakatan yang saling menguntungkan, dengan penekanan pada peran serta yang lebih besar dari PSH dalam kegiatan pengelolaan hutan, termasuk dalam pengambilan keputusan (Seymour dan Fisher, 1987; Bratamihardja, 1987).

Perubahan kelembagaan, seperti yang dipaparkan di atas, pada dasarnya identik dengan peningkatan (dari waktu ke waktu) aksesibilitas PSH terhadap sumber daya hutan. Pertanyaan yang mungkin bermanfaat untuk dikaji ialah kemanakah gerakan arah perubahan selanjutnya, jika hal itu terjadi? Apa saja konsekuensi-konsekuensi yang perlu diperhitungkan? Sejauh mana perubahan-perubahan itu dapat dikendalikan ke arah yang dikehendaki?

Sasaran dan Tujuan PS

Didalam Pedoman Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial dinyatakan bahwa PS Perum Perhutani merupakan program pembangunan dan pengamanan hutan dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan hutan guna meningkatkan fungsi-fungsi hutan secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan penduduk sekaligus perbaikan lingkungan dan menjaga kelestariannya (PERHUTANI, 1988). Secara spesifik, sasaran jangka panjang yang hendak dicapai adalah: (a) Tercapainya pengusahaan hutan yang optimal dan lestari; (b) Tercapainya masyarakat yang sadar akan perlunya hutan; dan (c) Tercapainya masyarakat yang sejahtera. Tujuan (goals) dari program PS adalah: (a) Pembangunan hutan di lahan kritis kawasan hutan berhasil; (b) Peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan hutan terselenggara; (c) Kesejahteraan masyarakat sekitar hutan meningkat; (d) Kualitas lingkungan pendukung kebutuhan masyarakat terbina; (e) Tekanan masalah sosial ekonomi terhadap hutan tertanggulangi (PERHUTANI, 1988).

PERFORMA PERHUTANAN

Pola Keterlibatan PSH

Pola keterlibatan penduduk dalam pengelolaan hutan, di Jawa, secara umum dapat diidentifikasi sebagai berikut, yang tidak harus bersifat *mutual exclusive*.

- (a) Bekerja sebagai buruh tani
- (b) Pemungut hasil hutan (kayu bakar, rumput, dan lain-lain).
- (c) Penggarap lahan untuk jenis tanaman yang hasilnya dipungutnya, sekaligus memelihara tanaman pokok (pohon).

Salah satu aspek yang secara mendasar membedakan pola-pola keterlibatan antara satu dengan lainnya ialah derajat aksesibilitas PSH (atau partisipan) dalam proses pembuatan keputusan penge-

elolaan hutan. Berdasarkan hal ini, pengelolaan hutan PERHUTANI dapat dibedakan menurut tiga pola.

- a) Pengelolaan hutan sepenuhnya oleh Perhutani. Dalam pola ini (disini disebut pola I), keterlibatan penduduk terutama sebagai pekerja buruh.
- b) Pengelolaan hutan (pola II) yang identik dengan pola I, kecuali, disini ada izin bagi penduduk untuk menggarap lahan hutan dengan jenis tanaman semusim untuk kebutuhan hidupnya.
- c) Pola III identik dengan pola II, dan partisipan lebih dalam pembuatan keputusan, meskipun masih terbatas pada kegiatan penggarapan lahan hutan.

Perbedaan karakteristik Pola II dan III adalah sebagai berikut (Rochani, 1988).

- a) Jangka waktu izin (kontrak) penggarapan lahan hutan 2 hingga 3 tahun pada Pola II, sedangkan pada Pola III sama dengan umur hidup tanaman pokok (30 tahun atau lebih);
- b) Wewenang partisipan dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan penggarapan lahan hutan, terutama dalam hal pemilihan komoditi, tidak ada dalam pola II, sebaliknya ada dalam Pola III. Hanya dalam Pola III partisipan diperbolehkan mengusahakan tanaman tahunan, disamping tanaman semusim.
- c) Dalam Pola III, hubungan antara partisipan dengan Perhutani mengikuti bentuk musyawarah, disertai pembinaan kepada partisipan melalui organisasi kelompok. Dalam Pola II, hubungan ini bersifat instruktif, dan pembinaan partisipan dilakukan secara perorangan.
- d) Bidang garapan lahan hutan pada Pola III relatif lebih luas, karena tanaman pokok ditanam mengikuti jarak tanam yang lebih jauh.

Beberapa Penemuan Penelitian Evaluatif

Penelitian fase kedua³⁾, penelitian evaluatif, telah dilaksanakan, dan mengungkapkan beberapa indikator keberhasilan PS. Hasil-hasil penelitian ini, antara lain diharapkan bisa memberikan arah yang lebih tepat bagi penelitian-penelitian mengenai PS selanjutnya (Kartasubrata, 1989).

Penelitian-penelitian evaluasi proyek perintisan terfokus pada penaksiran manfaat yang diperoleh oleh partisipan dari Pola

1) Penelitian fase pertama, tahun 1984/85 dalam rangka program PS, telah memberikan rekomendasi empiris bagi pembangunan proyek-proyek perintisan (*pilot project*) PS, meskipun masih terbatas di Pulau Jawa.

[I dan III. Ringkasan dari beberapa penemuan adalah sebagai berikut:

(a) FRR (*financial rate of return*) proyek perintisan berkisar antara 8.9 hingga 10.8 persen. Angka ini lebih rendah daripada (perkiraan) suku bunga pasar yang berlaku, yakni 12 persen (Manurung, 1989; Ratnawati, 1989; Rochani, 1989).

(b) Proporsi pendapatan dari sumber daya hutan cukup berarti berkisar anatar 44.4 hingga 58.6 persen dari total pendapatan. Proyek perintisan berhasil meningkatkan pendapatan penduduk (partisipan), tetapi belum nyata (Manurung, 1989; Ratnawati, 1989; Rochani, 1989; Palupi, 1989). Hanya partisipan dengan lahan garapan (andil) satu hektar atau lebih yang dapat menghasilkan pendapatan setara 320 kg beras, standar kebutuhan pangan minimum (Manurung, 1989).

(c) Makin besar luas lahan garapan, makin rendah proporsi pendapatan buruh tani (Manurung, 1989). Rata-rata curahan tenaga kerja partisipan di lahan hutan lebih tinggi daripada non-partisipan, namun besarnya tidak terlalu nyata, yakni 15 persen (Palupi, 1989). Makin luas lahan garapan makin besar curahan tenaga kerja (Muthia, 1989).

Beberapa implikasi dari hasil penelitian evaluatif adalah sebagai berikut:

(a) Kebutuhan akan produk pertanian (terutama pangan) dan kehutanan oleh partisipan relatif sangat besar.

(b) Produktivitas tenaga kerja meningkat searah dengan peningkatan luas lahan garapan.

(c) Peningkatan pendapatan partisipan dapat ditempuh melalui beberapa cara, yakni penambahan luas garapan dan jumlah modal, serta pemilihan komoditi yang lebih sesuai.

MASALAH PENELITIAN

Rumusan mengenai sasaran dan tujuan pengelolaan hutan, tercantum di atas, merefleksikan keprihatinan terhadap tiga kepentingan pokok, yaitu : (i) kondisi kehidupan PSH; (ii) lingkungan hidup; dan (iii) pelestarian sumber daya hutan. Pengetahuan mengenai karakteristik teknologi, yang mendasari bentuk hubungan antar kepentingan-kepentingan ini apakah komplementer ataukah kompetitif, sangat bermanfaat untuk diketahui.

PSH akan cenderung mengusahakan komoditi subsisten (tanaman pangan) daripada tanaman kayu-kayuan, lebih-lebih jika preferensi terhadap kepentingan jangka pendek lebih kuat daripada kepentingan jangka panjang. Dengan pola preferensi seperti ini, pemilihan komoditi pun akan cenderung berakibat pengorbanan kepentingan konservasi demi manfaat ekonomi jangka pendek (Tampubolon, 1988).

oleh karena itu, dari sudut (kombinasi) jenis-jenis komoditi (Raintree, 1981), hubungan antar ketiga kepentingan, terutama antara kepentingan (i) dengan (ii) dan (iii), akan mengikuti bentuk kompetitif. Hal ini disebabkan oleh tingginya derajat ketergantungan dari ketiga kepentingan pada sumberdaya hutan yang semakin langka. Pembatasan wewenang dalam pemilihan jenis tanaman, dan pelebaran jarak tanam tanaman pokok dalam PS merupakan salah satu indikator adanya kesadaran pengelolaan hutan akan bentuk hubungan yang kompetitif ini.

PS dirancang dengan maksud untuk memenuhi ketiga kepentingan melalui pemanfaatan bersama-sama sumber daya hutan (Seymour dan Fisher, 1987; Bratamihardja; lihat kutipan di bawah ini, Anon, 1987b⁴). Dengan demikian maka bentuk hubungan kompetitif menjadi karakteristik yang inheren dalam PS. Masalahnya, dalam kondisi demikian, bagaimanakah cara yang efektif untuk mencapai tujuan.

Setidak-tidaknya ada tiga alternatif pendekatan masalah pengelolaan hutan, yang dapat dicatat pada saat ini. Pertama melakukan realokasi penggunaan sumber daya lahan hutan antara dua kepentingan, yakni pengelola hutan dan PSH, yang ditentukan berdasarkan perbandingan harga-harga komoditi tanaman pokok hutan dan komoditi untuk keperluan PSH. Kedua, mengembangkan bentuk lain pengelolaan hutan yang mentransformasikan ekonomi PSH dari ekonomi berbasis lahan kepada ekonomi non lahan (*land-base economy ke non land-base economy*), dalam mana kontribusi sumber daya hutan secara substansial tetap dipertahankan. Ketiga, meningkatkan performa dari sistem pengelolaan hutan yang ada.

Alternatif (yang disebutkan) pertama mungkin merupakan pilihan yang paling tidak disukai, karena mengandung konsekuensi-konsekuensi distribusional yang cukup substansial. Selain itu upaya pelestarian sumber daya hutan mungkin sangat sulit dicapai dengan cara pendekatan ini. Hasil penelitian-penelitian evaluatif termasuk dalam alternatif ini; pada umumnya menganjurkan pengaliran yang lebih besar barang dan jasa dari sumber daya hutan, baik yang secara langsung (Kartasubrata, 1986), maupun melalui perluasan lahan garapan, peningkatan efisiensi dari kombinasi input usahatani, dan peningkatan wewenang partisipan dalam proses pembuatan keputusan di tingkat usahatani (Manurung, 1989; Ratnawati, 1989; Rochani, 1989; Kartasubrata, 1986). Pada dasarnya, rekomendasi dari hasil empiris ini membias pada kepentingan PSH⁵), dan identik dengan anjuran meningkatkan aksesabilitas PSH terhadap sumber daya (lahan) hutan. Masalahnya, sejauh mana pihak pengelola hutan mampu menerapkan hasil analisis-analisis tersebut, jika kepentingan pihak pengelola hutan dianggap perlu dipertahankan.

4) Di dalam negara dengan falsafah Pancasila dan berdasar pada UUD 1945 ini, kedua kepentingan atau tujuan itu harus dapat dipadukan menjadi suatu gerakan yang serasi. Dewasa ini interaksi kedua kepentingan masih terlalu kecil untuk mendukung kehidupan masyarakat yang begitu besar (Anon, 1987b).

Alternatif kedua, meskipun mungkin memiliki keunggulan komparatif, belum tentu merupakan pilihan yang paling baik jika diperhitungkan biaya oportunitas dalam bentuk (nilai) sumber daya yang telah diinvestasikan ke dalam pengembangan sistem pengelolaan hutan yang sedang diterapkan. Dengan demikian, pilihan jatuh pada alternatif ketiga.

Johnson (1985) menemukan bahwa pertumbuhan kapasitas memproduksi di bidang pertanian ditentukan oleh empat faktor, yaitu (i) Teknologi; (ii) Kualitas sumber daya fisik dan biologik; (iii) Ketrampilan (dan kapasitas) manusia; dan (iv) Kelembagaan. (Pengembangan Kualitas sumber daya fisik dan biologik juga ditentukan oleh perkembangan sains dan teknologi, karena itu dapat dikategorikan dalam faktor teknologi). Teknologi berperan tidak hanya dalam mengekspansikan kapasitas produksi, melainkan dapat pula merenggangkan intensitas konflik kepentingan atas sumber daya yang berciri tidak kompatibel⁶⁾ (Pakpahan, 1989). Penerapan sistem agroforestry dalam PS merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi untuk mengekspansikan kapasitas produksi kawasan hutan, meskipun kontribusinya sangat terbatas, sebagai mana tampak dari hasil penelitian-penelitian evaluatif. Pengendalian teknologi untuk pemecahan masalah sangat terbatas, karena pengembangannya memerlukan sumber daya (termasuk waktu) yang relatif besar.

Bimbingan dan penyuluhan yang telah dijalankan dalam rangka PS merupakan salah satu bentuk upaya meningkatkan ketrampilan partisipan. Dengan jalan ini, partisipan diharapkan semakin mampu membuat keputusan-keputusan yang lebih baik dalam arti efisiensi, dalam kegiatan produksi.

Beberapa studi menunjukkan bahwa peningkatan teknologi dan pendidikan bagi masyarakat hanya memberikan kontribusi kecil jika tanpa peningkatan dalam kelembagaan dan kebijaksanaan. Dibeberapa negara, reformasi kelembagaan dan kebijakan di bidang pertanian menghasilkan peningkatan produksi pertanian secara dramatik (Avrey, 1985 dalam Johnson, 1985 ; Johnson, 1985). Oleh karena itu, penelitian mengenai aspek kelembagaan relevan dengan upaya pemecahan masalah dalam pengelolaan hutan.

TUJUAN DAN LINGKUP PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Penelitian yang direncanakan ini mencoba mempelajari sejauh mana faktor kelembagaan dapat memberi kontribusi terhadap peningkatan performa sistem pengelolaan hutan. Signifikans dari penelitian ini terletak pada hipotesis bahwa struktur kelembagaan

5) Beberapa pertimbangan yang mempengaruhi pembiasan ini, secara implisit, dapat ditemukan dalam (ringkasan) hasil penelitian-penelitian evaluatif tertera di atas.

mempengaruhi performa ekonomik dan bukan sebaliknya, performa ekonomik menentukan struktur kelembagaan (Runge, 1984; Schmid, 1987; Anderson and Hill, 1976). Dengan kata lain performa ekonomik bersifat kondisional terhadap struktur kelembagaan yang berlaku (Runge, 1984). Pendekatan kelembagaan mencakup baik aspek efisiensi maupun distribusi (Just, 1988; Schmid, 1987). Isu pokok yang menjadi sasaran penelitian ini adalah, apakah dengan redistribusi biaya-manfaat maka manfaat netto total bertambah sehingga manfaat itu bagi PSH dapat ditingkatkan tanpa mengurangi manfaat netto bagi pengelola hutan? Jika tidak, alternatif kelembagaan yang bagaimanakah yang dapat dianjurkan?

Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan berikut:

(a) Mempelajari bagaimana ciri-ciri interdependensi dalam sistem pengelolaan hutan;

(b) Mempelajari bagaimana struktur hak-hak properti yang ada dan pengaruhnya terhadap performa sistem pengelolaan hutan (c) Kemungkinan-kemungkinan perubahan struktur hak-hak properti dan pengaruhnya terhadap performa sistem pengelolaan hutan.

Sintesa antara hasil analisis penelitian-penelitian evaluatif yang telah dijalankan dengan hasil penelitian ini nanti diharapkan akan memberikan informasi yang lebih relevan dengan hal-hal yang menjadi concern pembuat keputusan.

Lingkup Penelitian

Suatu kelembagaan dicirikan oleh tiga unsur (Shaffer and Schmid dalam Pakpahan 1989), yakni (i) Batas yurisdiksi (Jurisdictional Boundary); (ii) Hak-hak properti (*Property Rights*); dan (iii) Aturan representasi (*Rules of Representation*). Batas yurisdiksi menentukan apa dan siapa yang tercakup dalam suatu masyarakat. Hak-hak properti merupakan konsensus yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat dalam hal kepentingannya terhadap sumber daya. Aturan representasi mengatur siapa yang berhak berpartisipasi terhadap apa dalam proses pengambilan keputusan (Pakpahan 1989). Penelitian ini memfokuskan diri hanya pada unsur yang disebut kedua (Hak-hak properti), yakni yang sangat relevan dengan isu pokok penelitian ini.

Dua indikator utama yang akan digunakan sebagai penciri performa kelembagaan ialah efisiensi penggunaan sumber daya, dan distribusi biaya-manfaat. Berdasarkan ciri-ciri dari kedua indikator, juga akan dicoba memperkirakan pengaruh dari struktur kelembagaan terhadap aspek fisik (lingkungan), khususnya konservasi sumber daya hutan.

⁶ Suatu sumber daya dikatakan berciri tidak kompatibel (*incompatible*) apabila masuknya satu kepentingan menggeser kepentingan lain atas sumber daya yang sama.

KERANGKA ANALITIK DAN LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini akan mengadopsi model (dasar) yang dianjurkan oleh Schmid (1987) sebagai kerangka analitik. Menurut model ini, penelitian kelembagaan mencakup analisis hubungan (relation) antar tiga peubah, yaitu: (i) Sumber interdependensi; (ii) Variasi dan distribusi hak-hak properti; dan (iii) Performa. Aspek yang menjadi sasaran pokok hubungan antar ketiga peubah ialah kemampuan dari alternatif (struktur) hak-hak properti dalam mengontrol sumber-sumber interdependensi.

Prosedur kerja penelitian ini ialah mengidentifikasi dan menganalisa hubungan antar peubah-peubah dari berbagai alternatif (atau tipe) kelembagaan. Tiga tipe kelembagaan, yang identik dengan tiga pola pengelolaan hutan, yang diterapkan akan digunakan sebagai contoh tipe-tipe struktur kelembagaan. Lokasi penelitian yang akan dipilih adalah dua satuan pengelolaan hutan (KPH atau RPH) yang memiliki ketiga pola pengelolaan hutan. Untuk menangkap pengaruh dari faktor faktor eksternal (faktor fisik), akan dipilih satu satuan dengan katagori berperforma baik, dan satu lagi kurang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andersons, Terry L. and Peter J. Hill The Role Of Private Property In The History Of American Agriculture. 1776 - 1976. Amer. J. Agr. Econ. 58, (1976) : 937-45.
- Anon. Proceeding Of The Eight World Congress. 1987a.
- _____. Program Pengembangan Perhutanan Sosial (Social Forestry) di Indonesia. 1987b.
- Avrey, Dennis. U. S. Farm Dilemma : The Global Bad News Is Wrong. Science 230 (1985):408-12. In: Johnson, Glenn L. Agricultural Surpluses--Research On Agricultural Technologies, Institutions, People and Capital Growth. Paper Presented At Conference On Crop Productivity-Research Imperatives Resivited, Boyne HighLands, M I. 1985.
- Kartasubrata, Junus. Laporan Penyelenggara Seminar Koordinator Pelaksana. Dalam: Prosiding Seminar Hasil Penelitian Perhutanan sosial di Jawa. PSP-Fak. Kehutanan, IPB. Bogor. 1989.

DISKUSI SIDANG SEMINAR KE EMPAT

Penanya : William Sunderlin

1. Aspek-aspek dalam proses persiapan proyek (partisipasi) tergantung pada ketrampilan atau pelatihan Perum Perhutani ?

2. Karena adanya adat setempat, Perhutani tidak berhak meminta balas jasa tenaga kerja. Apakah ini berarti ada keengganan/penguasaan diri terhadap pemeliharaan tanaman pokok yang nyata ?

3. Mungkin PS bukan organisasi, melainkan program yang meliputi kegiatan beberapa organisasi, antara lain Perhutani dan KTH. Setuju atau tidak ?

Jawab : Amri Marzali

1. Tergantung dari map, kemiringan dan jenis tanah

2. Ada

3. Setuju

Penanya : Frances Seymour

1. Apakah bersedia memberikan beberapa saran mengenai perubahan yang diperlukan supaya pelaksanaan program lebih mencerminkan "Doktrin PS" ?

2. Apakah percaya bahwa faktor psikologis cukup untuk menerangkan kenapa anggota-anggota KTH masih ikut serta program PS sampai tahun ke 3 walaupun dirugikan terus menerus ? Kalau mereka mencurahkan waktu pada sesuatu yang merugikan sementara ada alternatif lain yang lebih memberi keuntungan, mereka bukan *Rational economic actors*. Kalau tidak ada alternatif lain, mungkin *Opportunity cost* (atau *Shadow wage*) yang bapak perkirakan terlalu tinggi.

Jawab : Amri Marzali

1. Ini perlu rapat pimpinan Program Perhutanan Sosial.

2. Petani sering bersikap rasional atau juga non-rasional Keduanya sering terjadi, tergantung situasi.

Penanya : Carol Stoney

1. Apakah ketrampilan anggota KTH cukup tinggi sehingga mereka bisa menanam dan memelihara jenis tanaman seperti panili, coklat dan lada yang perlu teknologi dan pemeliharaan yang intensif ?

2. Apakah instansi lain bisa menyediakan penyuluhan teknis terhadap jenis-jenis tanaman tersebut supaya ketrampilan anggota KTH meningkat ?

Jawab : Amri Marzali

1. Tidak ! Perlu penyuluhan dan perubahan kultural, khususnya orientasi pasar.

2. Bisa, tergantung pendekatan Perhutani

Penanya : Bungaran Saragih

1. Apakah PS ada prospek untuk melembaga ?

Jawab : Amri Marzali

1. Ini masalah politik nasional. Perlu pembangunan struktural dan kultural dan bagaimana usaha kita dalam situasi dan kondisi yang ada dengan konsekuensi pembangunan kultur sosial yang ada. Kuncinya adalah Perhutani !

Penanya : Jejen

1. Bagaimana hubungan masyarakat dengan Perhutani ?

2. Lokasi merupakan sengketa ~~sampai~~ sampai tingkat nasional sehingga dengan adanya PS ada perbaikan. Dan ini merupakan bukti hubungan baik. Mohon dijelaskan !

Jawab : Amri Marzali

1. Hubungan tidak bagus, hubungan Pemerintah setempat dengan Perhutani juga kurang bagus.

2. Secara legal itu milik Perhutani, secara de facto diduduki oleh masyarakat. Adanya PS dapat mengadakan perubahan antara masyarakat dengan Perhutani, tetapi masih cukup jauh.

Penanya : Satyawan Sunito

1. Apakah akses petani terhadap kawasan hutan sebagai sumber pendapatan/kebutuhan jadi berkurang ? Atau ada yang hilang ?

Jawab : Amri Marzali

1. Ada yang hilang, yaitu kayu bakar, karena penduduk perlu kayu bakar.

Penanya : Mas'ud Yunus

1. Mohon dijelaskan mengenai model pengabdian yang saudara kemukakan ?

Jawab : Jen Tatum

1. Segitiga dalam presentasi saya terkait kepentingan dalam scope yang luas, jadi misalnya hutan juga mempunyai kepentingan untuk devisa negara, konservasi tanah dan air, dan lain-lain. Keuntungan/manfaatnya itu bisa lebih luas, tapi efeknya bisa lebih jauh. Keuntungannya lebih jauh kaitannya antara up land ke low land. Penelitian prosperity rights, yaitu petugas kehutanan harus bertindak bukan atas kepentingan sendiri, bertindak wajar, mengabdikan pada negara, internasional ataupun ilmu pengetahuan.

SIDANG SEMINAR KELIMA